

BAB 4

GAMBARAN UMUM NEGOSIASI *TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP*

4.1 Proses Negosiasi *Trans-Pacific Partnership*

Trans-Pacific Partnership merupakan sebuah bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi yang dibentuk pada tahun 2016 oleh 12 negara *pacific rim*, yaitu negara-negara yang terletak di lingkaran Samudera Pasifik. 12 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.⁷⁷

Trans-Pacific Partnership atau yang kemudian disingkat menjadi TPP merupakan kerja sama yang secara umum bergerak dalam bidang ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan arus perdagangan di kawasan Asia-Pasifik, memperkuat hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan negara Asia-Pasifik, menghilangkan hambatan dagang dan tarif dalam aktivitas perdagangan didalam kawasan, serta menciptakan peluang pasar yang lebih luas.⁷⁸ Lebih lanjut, TPP memiliki tujuan untuk mempromosikan investasi, menciptakan liberalisasi pasar yang lebih jauh, serta membentuk peraturan perdagangan bersama untuk menciptakan hubungan perdagangan yang lebih komprehensif.⁷⁹

Trans-Pacific Partnership berangkat dari kerja sama ekonomi antar empat negara pasifik yaitu Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, dan Singapura yang secara resmi dibentuk pada tahun 2006 dengan nama *Trans-*

⁷⁷BBC News, *TPP: What is it and why does it matter?*, dalam <http://www.bbc.com/news/business-32498715>, diakses pada 23 April 2018.

⁷⁸*Trans-Pacific Partnership Agreement*, Pembuka.

⁷⁹*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*, bab. 1, artikel 1.1, poin 3, hal 1-1.



Pacific-Strategic Economic Partnership.⁸⁰ Kemudian pada tahun 2008, Amerika Serikat menyatakan keinginannya untuk bergabung dalam negosiasi tersebut. Rencana bergabungnya Amerika Serikat kedalam negosiasi TPP sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden George Bush, ketika Presiden Bush menyatakan kepada kongres untuk melakukan negosiasi dengan anggota TPP yang ada pada tanggal 22 September 2008, dan negosiasi dengan calon anggota TPP, Australia, Peru, dan Vietnam pada tanggal 30 Desember 2008.⁸¹

Pertemuan pertama untuk membahas negosiasi TPP rencananya akan dilangsungkan pada akhir Maret 2009 di Singapura, namun ditunda atas permintaan Amerika Serikat untuk memberikan waktu kepada kabinet Presiden Barack Obama mengambil alih pemerintahan Amerika Serikat dan melakukan review terhadap kebijakan perdagangannya.⁸²

Pada 14 Desember 2009, *United State Trade Representative* (USTR) secara resmi memberitahukan kepada Kongres mengenai keinginan pemerintahan Obama untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara anggota TPP. Dari pemberitahuan tersebut kemudian ditetapkan batas waktu 90 hari dibawah undang-undang *Trade Promotion Authority* (TPA) untuk melakukan konsultasi dengan kongres sebelum negosiasi dilaksanakan.⁸³

Trade Promotion Authority sendiri merupakan undang-undang yang mengatur tentang proses pengawasan dan konsultasi negosiasi perdagangan

⁸⁰Ian Fergusson dan Bruce Vaughn, “*The Trans-Pacific Partnership Agreement*”, dalam *Journal of Current Issues in Globalization*, vol. 4, 2011, hal. 246.

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, hal. 247.



serta menetapkan berbagai prasyarat kepada Presiden sebelum melaksanakan proses negosiasi. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk melakukan negosiasi perdagangan tanpa adanya intervensi dari badan legislatif, kemudian memberikan kesempatan kepada Kongres untuk meninjau kembali dan memutuskan apakah akan membentuk undang-undang baru yang akan mengakomodasi perjanjian perdagangan tersebut.⁸⁴

Undang-undang yang dibentuk pada tahun 1974 ini berfungsi untuk memberikan panduan kepada pemerintahan Amerika Serikat dalam melakukan negosiasi perdagangan untuk menciptakan perjanjian perdagangan yang adil, mendukung pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat, serta menghilangkan hambatan dalam pasar asing.⁸⁵

Negosiasi tahap pertama dilakukan di Melbourne, Australia pada 15 hingga 19 Maret 2010. Negosiasi tahap pertama ini dihadiri oleh lebih dari 200 delegasi dari delapan negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Agenda yang berlangsung selama empat hari ini diawali dengan pembahasan mengenai kerangka kerja untuk negosiasi kedepannya.⁸⁶ Pembahasan dalam pertemuan ini juga meliputi hal-hal mengenai produk industri, pertanian, standar kebersihan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan (*sanitary and phyto-sanitary standards*), telekomunikasi, jasa keuangan, bea cukai, *rules of origin*, pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, lingkungan, dan *capacity*

⁸⁴United States Trade Representative, *Trade Promotion Authority*, dalam <https://ustr.gov/trade-topics/trade-promotion-authority>, diakses pada 23 April 2018.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶United States Trade Representative, *Trans-Pacific Partnership Round 1: Melbourne*, dalam <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/round-1-melbourne>, diakses pada 24 April 2018.



building.⁸⁷ Dalam negosiasi tahap pertama ini, Australia menyambut baik keinginan Amerika Serikat untuk bergabung dalam negosiasi TPP bersama enam negara lainnya, dengan mengatakan bahwa bergabungnya Amerika Serikat kedalam negosiasi TPP dapat memacu proses negosiasi ini lebih jauh kedepan, mendorong negara-negara lain untuk ikut berpartisipasi, serta dapat menjadi kerangka kerja yang berperan sebagai batu loncatan untuk pembentukan *Free Trade Area of the Asia Pacific* (FTAAP).⁸⁸

Negosiasi tahap kedua berlangsung pada 14 hingga 18 Juni 2010 di San Francisco, Amerika Serikat. Pertemuan yang berlangsung selama lima hari ini dibuka dengan pengarahan oleh Wakil *United States Trade Representative* Barbara Weisel kepada para *stakeholders* yang berpartisipasi dalam pertemuan di San Francisco tersebut.⁸⁹ Agenda yang menjadi pembahasan dalam negosiasi putaran kedua ini adalah antara lain menentukan kerangka kerja untuk negosiasi akses pasar, menentukan struktur untuk perjanjian TPP kedepannya apakah menggunakan struktur dari *free trade agreement* (FTA) yang sudah ada atau membentuk struktur perjanjian yang baru, pemaparan pendekatan Amerika Serikat terhadap masalah investasi, serta proses konsultasi dengan Kongres apabila ada negara lain yang ingin bergabung kedalam negosiasi TPP.⁹⁰

⁸⁷Ian Fergusson dan Bruce Vaughn, "*The Trans-Pacific Partnership Agreement*", dalam *Journal of Current Issues in Globalization*, vol. 4, 2011, hal. 247.

⁸⁸*The Hon Simon Crean MP – Former Minister for Trade*, "*The Trans-Pacific Partnership – Moving Forward*", dalam http://trademinister.gov.au/releases/2009/sc_091114.html, diakses pada 1 Mei 2018.

⁸⁹Office of the United States Trade Representative, *Trans-Pacific Partnership June 2010 San Francisco, California*, dalam <https://ustr.gov/tpp-san-francisco>, diakses pada 24 April 2018.

⁹⁰*Ibid.*



Dalam negosiasi putaran kedua ini, beberapa organisasi dan kelompok kepentingan juga turut berpartisipasi membawa isu-isu tertentu seperti hak-hak tenaga kerja, agrikultur, dan perlindungan lingkungan, serta isu-isu lainnya.⁹¹ Beberapa organisasi dan kelompok kepentingan yang hadir diantaranya adalah, AFL-CIO, American Farm Bureau Federation, American Sugar Alliance, California Farm Bureau Federation, California Public Health Association-North, Center for Policy Analysis on Trade and Health (CPATH), Citizens Trade Campaign, FedEx Express, Friends of the Earth, Intel, International Forum on Globalization, Land O Lakes, National Center for APEC, National Farmers Union, National Milk Producers Federation, National Pork Producers Council, Oceana, Oregon Fair Trade Campaign, PETA, Public Citizen, Sierra Club, U.S. Chamber of Commerce, Yale Law Offices.⁹²

Negosiasi TPP putaran ketiga berlangsung pada 5 hingga 8 Oktober 2010 dilaksanakan di Brunei Darussalam. Negosiasi putaran kedua ini menerima kehadiran peserta baru yaitu Malaysia.⁹³ Pembahasan dalam negosiasi putaran ketiga ini melanjutkan pembahasan pada negosiasi putaran pertama yaitu membahas mengenai produk-produk industri, pertanian, tekstil, standar kesehatan dan kebersihan, jasa, investasi, jasa keuangan, hak kekayaan intelektual, serta lingkungan. Dalam pertemuan ini juga mendiskusikan isu-isu yang bersifat lintas sektoral seperti mempromosikan

⁹¹Ibid.

⁹²Ibid.

⁹³ United States Trade Representative, *Round 3: Brunei*, dalam <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/round-3-brunei>, diakses pada 5 Mei 2018.



daya saing, mempermudah bagi usaha-usaha kecil dan menengah untuk memanfaatkan peluang dari TPP yang akan datang, serta pembangunan.⁹⁴

Pertemuan di Brunel ini dilanjutkan dengan pembahasan mengenai aspek telekomunikasi, *e-commerce*, bea cukai, hambatan dagang teknis, serta *capacity building*. Selain itu negosiasi ini juga membahas tujuan yang telah ditetapkan untuk negosiasi putaran ini yaitu mempersiapkan dokumen konsolidasi dan proposal untuk melakukan kerja sama.

Pada hari terakhir negosiasi putaran ketiga ini, para pejabat pemerintahan serta perwakilan bisnis hadir dalam seminar mengenai ketenagakerjaan. Dalam seminar satu hari tersebut, para delegasi TPP diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing mengenai pendekatan terhadap pencakupan ketentuan ketenagakerjaan dalam perjanjian perdagangan mereka. Perwakilan dari USTR Lewis Karesh memberikan presentasi mengenai bagaimana pendekatan Amerika Serikat terhadap ketentuan ketenagakerjaan dalam perjanjian perdagangan, yang memfokuskan kepada ketentuan ketenagakerjaan dalam perjanjian perdagangan Amerika Serikat, pentingnya menghormati hak-hak dasar tenaga kerja, serta cara-cara untuk memastikan penegakan hukum ketenagakerjaan secara efektif.⁹⁵

Negosiasi putaran keempat berlangsung di Auckland, Selandia Baru pada tanggal 6 hingga 10 Desember 2010. Negosiasi kali ini melanjutkan pembahasan negosiasi putaran sebelumnya yaitu mengenai perdagangan barang, jasa keuangan, bea cukai, ketenagakerjaan, dan hak kekayaan

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*



intelektual, serta mempromosikan peluang bagi usaha-usaha kecil dan menengah, konektivitas yang lebih besar, partisipasi perusahaan Amerika Serikat dalam arus *supply chain* di Asia-Pasifik, serta meningkatkan keterpaduan dalam sistem regulasi antar negara-negara TPP untuk mempermudah arus perdagangan di seluruh kawasan.⁹⁶ Sekitar 100 pemegang saham yang terdiri dari perwakilan perusahaan dan organisasi non-pemerintah turut hadir dalam negosiasi di Auckland tersebut untuk memberikan presentasi dan masukan kepada para negosiator mengenai pendekatan terhadap regulasi perdagangan, *supply chain*, kemudahan bagi usaha kecil dan menengah, serta tantangan yang akan dihadapi kedepannya.⁹⁷

Para negosiator juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar informasi dengan perwakilan dari Dewan Serikat Dagang Selandia Baru.

Perwakilan dari *United States Chamber of Commerce* juga memberikan presentasi mengenai praktek pembuatan kebijakan kepada perwakilan sektor swasta dari Australia dan Selandia Baru dalam sebuah panel diskusi.⁹⁸ Para *stakeholder* yang berpartisipasi dalam negosiasi tersebut juga diberikan pembahasan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang relevan terhadap negosiasi TPP yang sedang berlangsung.

Selain pembahasan mengenai aspek-aspek dalam perdagangan, dalam negosiasi yang berlangsung selama lima hari tersebut juga melanjutkan diskusi terkait penyusunan teks perjanjian TPP.⁹⁹

⁹⁶ United States Trade Representative, *Round 4: Auckland*, dalam <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/round-4-auckland>, diakses pada 5 Mei 2018.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*



Negosiasi putaran kelima berlangsung di Santiago, Chile pada tanggal 14 hingga 18 Desember 2011. Sembilan negara anggota negosiasi TPP yang hadir, Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Malaysia, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam, disambut oleh Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Internasional Chile, Jorge Bunster, dan diberikan dukungan untuk melanjutkan pencapaian dari negosiasi putaran sebelumnya.¹⁰⁰ Negosiasi dimulai dengan pertemuan yang membahas mengenai akses pasar untuk barang, telekomunikasi, bea cukai, jasa keuangan, hambatan teknis dalam perdagangan, masalah hukum dan peraturan, serta lingkungan. Para negosiator TPP juga akan melakukan pertemuan dengan para *stakeholder* dari sekitar 60 pelaku usaha sektor publik maupun swasta.¹⁰¹

Pada hari ketiga negosiasi TPP di Chile ini, delegasi dari serikat pekerja Chile turut menghadiri seminar tentang Hukum dan Praktek Ketenagakerjaan Chile, dimana para pakar dari pemerintah Chile, serikat dagang, dan industri memberikan informasi mengenai penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan Chile, prosedur inspeksi, serta penegakan institusi administratif dan yudisial.¹⁰² Para pakar SPS (*sanitary and phyto-sanitary*) dalam negosiasi TPP juga mengikuti seminar tentang sertifikasi alat-alat kesehatan elektronik dan program inspeksi berbasis resiko yang dibawakan oleh lembaga hukum dari Amerika Serikat, Australia, dan Chile.¹⁰³

¹⁰⁰ United States Trade Representative, *Round 5: Santiago*, dalam <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/round-5-santiago>, diakses pada 6 Mei 2018.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*



Hari terakhir negosiasi TPP kelima ini para anggota negosiasi melanjutkan kembali proses penyusunan dokumen kerja sama, termasuk didalamnya membahas mengenai hak-hak dan kewajiban setiap negara anggota, dan mencakup semua aspek dalam hubungan perdagangan dan investasi. Para negosiator dengan saksama mengulas kembali proposal untuk dokumen kerja sama TPP yang ditawarkan dari masing-masing negara, termasuk mempertimbangkan kepentingan dan keinginan setiap negara dengan harapan terciptanya pemahaman yang sama dari setiap negara sehingga kemudian negosiasi dapat berlanjut.¹⁰⁴

Dalam negosiasi TPP putaran keenam yang berlangsung di Singapura mulai dari tanggal 24 Maret hingga 1 April 2011, para negara anggota melanjutkan proses penyusunan dokumen kerja sama resmi, yang memuat komitmen terhadap semua aspek dalam hubungan dagang dan investasi masing-masing negara.¹⁰⁵ Pada pembukaan negosiasi putaran keenam ini, para negosiator saling bertukar penawaran mengenai jasa dan investasi, pembelian oleh pemerintah, serta *rules of origin* untuk produk-produk tertentu. Para negosiator juga mengikuti seminar dengan lebih dari 50 *stakeholder* dari berbagai kelompok usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

Berikutnya Amerika Serikat beserta negara-negara lainnya mengajukan rancangan dokumen baru yang meliputi isu-isu lainnya seperti, barang-barang industri, masalah kesehatan manusia dan hewan serta tumbuhan (*sanitary and phytosanitary issues*), hambatan teknis dalam perdagangan, serta

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵ United States Trade Representative, *Round 6: Singapore*, dalam <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/round-6-singapore>, diakses pada 6 Mei 2018.



lingkungan.¹⁰⁶ Amerika Serikat juga mengajukan rancangan dokumen mengenai kesepadanan aturan (*regulatory coherence*), sebuah isu dimana untuk pertama kalinya dalam sebuah perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk memudahkan sistem regulasi dari masing-masing negara anggota TPP beroperasi secara lebih mudah dan saksama, sehingga dapat memudahkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mengakses pasar asing lebih jauh.¹⁰⁷

Kemudian, para anggota negosiasi TPP juga melakukan pertukaran pemikiran terhadap proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat mengenai isu-isu lintas sektoral seperti persaingan dan fasilitas bisnis, mendorong partisipasi pelaku usaha kecil dan menengah dalam perdagangan internasional, memperdalam hubungan rantai pasokan dan produksi antar negara-negara anggota TPP, serta mendorong pembangunan.¹⁰⁸

4.2 Keanggotaan dalam Negosiasi Trans-Pacific Partnership

Para pengamat dan pembuat kebijakan percaya bahwa dengan bergabungnya Amerika Serikat kedalam negosiasi *Trans-Pacific Partnership* dapat menjadi pendorong bagi negara Asia-Pasifik lainnya untuk ikut bergabung.¹⁰⁹ Tokoh negara seperti Menteri Perdagangan Australia Simon Crean dan Menteri Perdagangan Selandia Baru Tim Groser juga berspekulasi bahwa negosiasi TPP dapat digunakan oleh Amerika Serikat sebagai batu

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Ian Fergusson dan Bruce Vaughn, "The Trans-Pacific Partnership Agreement", dalam *Journal of Current Issues in Globalization*, vol. 4, 2011, hal. 247.



loncatan untuk membangun Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik dan menempatkan Amerika Serikat lebih jauh kedalam integrasi kawasan Asia Pasifik.¹¹⁰ Keinginan Amerika Serikat untuk bergabung kedalam negosiasi TPP juga diharapkan dapat mendukung kepentingan Amerika Serikat untuk menetapkan standar baru dalam beberapa aspek perdagangan seperti hak kekayaan intelektual, penetapan standard, transparansi, dan lingkungan di kawasan Asia Pasifik.¹¹¹

Pada awal pembentukan negosiasi TPP, Chile, Selandia Baru, dan Singapura menyatakan dukungan mereka terhadap bergabungnya Amerika Serikat kedalam negosiasi, dimana bergabungnya Amerika Serikat dapat mempermudah TPP nantinya untuk melakukan ekspansi. Chile juga sangat mendorong adanya ekspansi kawasan FTA karena Chile merupakan negara yang letaknya cukup terisolasi dan sangat bergantung kepada perdagangan, sehingga dengan adanya TPP ini diharapkan dapat memperluas aktivitas perdagangan Chile menuju pasar Asia.¹¹² Selandia Baru yang juga merupakan negara yang sangat bergantung pada perdagangan mendukung adanya proses liberalisasi dalam perdagangan, tidak hanya dalam forum WTO namun juga berusaha untuk menjalin hubungan perdagangan bebas lainnya baik secara bilateral maupun multilateral sehingga negosiasi TPP ini digunakan oleh Selandia Baru sebagai momentum untuk melakukan liberalisasi perdagangan antara negara-negara anggota APEC.¹¹³ Selandia

¹¹⁰Ibid.

¹¹¹Daniel Sullivan, Assistant Secretary of State for Economic, Energy and Business Affairs, "The Administration's Focus on Promoting Free Trade and Enhancing U.S. Trade and Export Opportunities", September 2008.

¹¹²Ian Fergusson dan Bruce Vaughn, *Op. cit.*, hal. 249.

¹¹³"Trans-Pacific Partnership", *The Daily Post New Zealand*, 23 September 2008.



Baru juga mendukung bergabungnya Amerika Serikat kedalam TPP karena Amerika Serikat dilihat sebagai aktor pendukung dalam hal ekonomi dan strategis.¹¹⁴

Singapura secara umum juga menginginkan agar Amerika Serikat ikut terlibat dalam hal ekonomi dan strategis dalam kawasan Asia Pasifik, dan mendukung Amerika Serikat bergabung kedalam negosiasi TPP. Singapura memiliki keinginan untuk menghubungkan kawasan Asia dengan kawasan Amerika¹¹⁵, dengan pidato Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada 15 November 2009 yang menyambut keinginan Amerika Serikat untuk bergabung kedalam TPP –“*all of us welcomed very much the announcement of the U.S. yesterday to engage with the TPP*”.¹¹⁶

Disisi lain, Vietnam yang statusnya masih sebagai pengamat dalam proses negosiasi TPP¹¹⁷, rencana keikutsertaannya dalam TPP dinilai kontroversial bagi sebagian anggota negosiasi.¹¹⁸ Diantara negara-negara anggota lain yang notabenehnya termasuk kedalam negara dengan ekonomi menengah keatas, Vietnam termasuk negara yang paling kurang berkembang. Meskipun Vietnam telah membuat kemajuan yang cukup bagus dalam melakukan liberalisasi pasarnya dan telah menjadi anggota WTO, masih terdapat beberapa kritik terhadap standar hak ketenagakerjaan, perlindungan

¹¹⁴Ian Fergusson dan Bruce Vaughn, *Loc. Cit.*

¹¹⁵“Singapore Welcomes US Joining Trans-Pacific Trade Agreement”, *Channel News Asia*, 22 September 2008.

¹¹⁶“Asia-Pacific Leader Welcome Obama’s Commitment to Trans Pacific Partnership”, *International Trade Reporter*, 19 November 2009.

¹¹⁷“Second TPP Negotiating Round Concludes; Two More Rounds Scheduled for This Year”, *International Trade Reporter*, 24 Juni 2010.

¹¹⁸“Possible Inclusion of Vietnam in TPP Talks Sparks Controversy”, *Inside US Trade*, 6 Maret 2009.



kekayaan intelektual, dan penanganan korupsi, serta penegakan terhadap kebijakan hak asasi manusia.¹¹⁹

Salah satu kelompok yang menyatakan penolakannya terhadap keikutsertaan Vietnam yaitu kelompok pengusaha pakaian dan tekstil Amerika Serikat, dalam wawancara Komite Staf Kebijakan Perdagangan pada 5 Maret 2009. Asosiasi Nasional Usaha Manufaktur juga menunjukkan rasa keberatan apabila Vietnam bergabung kedalam negosiasi TPP dengan menyatakan adanya hambatan yang sangat besar dalam kegiatan ekspor Amerika Serikat ke Vietnam diantaranya rendahnya perlindungan untuk kekayaan intelektual, sulitnya proses perizinan, permasalahan dalam penetapan standar terhadap produk barang, regulasi, subsidi, dan kurangnya transparansi.¹²⁰ Namun, keinginan yang ditunjukkan Vietnam untuk melakukan reformasi yang dibutuhkan agar bisa bergabung kedalam TPP dapat menjadi pendorong bagi negara berkembang lainnya untuk melakukan hal serupa.¹²¹

Malaysia juga merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk bergabung kedalam negosiasi TPP. Pada 5 Oktober 2010, Perwakilan Dagang Amerika Serikat Ron Kirk memberitahukan kepada Kongres bahwa akan melakukan negosiasi dengan Malaysia terkait TPP setelah negara anggota lainnya menyetujui keinginan Malaysia untuk bergabung.¹²² Dalam surat yang ditujukan kepada Kongres, Ron Kirk menyatakan bahwa Malaysia saat

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Ian Fergusson dan Bruce Vaughn, *Op. Cit.*, hal. 250.

¹²² Ian Fergusson dan Bruce Vaughn, "The Trans-Pacific Partnership Agreement", dalam jurnal *Congressional Research Service*, 12 Desember 2011, hal. 4.



ini sedang melakukan reformasi ekonomi, dan telah memastikan kepada Amerika Serikat bahwa Malaysia siap untuk membentuk perjanjian ekonomi dengan standar yang sesuai.¹²³ Malaysia sendiri melihat TPP sebagai langkah selanjutnya dalam membentuk integrasi dikawasan Asia-Pasifik. Tidak hanya itu, TPP secara spesifik dapat dimanfaatkan oleh Malaysia sebagai peluang pasar baru untuk produk-produknya seperti produk olahan coklat, minyak mentah, tekstil dan pakaian, sepatu dan sandal, produk olahan logam, serta produk jam tangan dan jam dinding.¹²⁴

Sejak pertama kali Amerika Serikat mengumumkan keinginannya untuk bergabung dalam negosiasi TPP serta adanya kemungkinan negara-negara lain untuk bergabung, terdapat pertimbangan didalam Kongres dimana adanya kekhawatiran terhadap akses pasar yang semakin terbuka dalam TPP serta adanya negara-negara dengan pemerintahan yang cenderung otoriter seperti Brunei Darussalam dan Vietnam.¹²⁵ Senator Charles Grassley, anggota dari Komite Keuangan pada saat itu, menyambut dengan baik dan mendukung keinginan Amerika Serikat melalui pemerintahan Presiden George Bush untuk bergabung kedalam negosiasi TPP¹²⁶:

“Today’s announcement is good news. It’s in our national interest to strengthen our economic relations with the Trans-Pacific region. Negotiation of this agreement will help further that effort. And it may pave the way to a broader regional trade agreement in the future. If we want to have any influence over that process, we need to get involved. We can’t advance our economic interest if we’re not at the table”

¹²³ Surat dari Duta Besar Ron Kirk kepada Kongres Nancy Pelosi, 5 Oktober 2010, pdf.

¹²⁴ Ian Fergusson dan Bruce Vaughn, *Op.cit.*, hal. 5.

¹²⁵ Surat dari *House Trade Working Group* kepada USTR Ron Kirk, 20 Januari 2010, pdf, dalam http://www.michaud.house.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=908&Itemid=76

¹²⁶ “*Trans-Pacific Economic Partnership, Pending Trade Agreements*”, *Congressional Documents and Publications*, 22 September 2008.



Kemudian setelah berganti ke pemerintahan Presiden Barack Obama, sebanyak 45 anggota parlemen menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Obama pada tanggal 10 Maret 2009 untuk segera melanjutkan proses negosiasi TPP.¹²⁷ Kongres mengharapkan bahwa TPP nantinya akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Amerika Serikat secara khusus serta memudahkan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain seperti menghilangkan hambatan tarif untuk perdagangan barang dan hambatan lainnya dalam perdangan jasa maupun sektor-sektor lain.¹²⁸

Namun disamping itu, Kongres juga menyampaikan kekhawatiran apabila melakukan negosiasi perdagangan dengan negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan otoriter seperti Brunei Darussalam dan Vietnam karena dikhawatirkan akan mempengaruhi proses negosiasi dan penerapan liberalisasi pasar yang nantinya akan diterapkan dalam TPP.¹²⁹ Kongres juga menyatakan kekhawatirannya dalam surat yang ditujukan kepada USTR Ron Kirk pada 11 Maret 2010 mengenai rencana perluasan pasar untuk produk olahan susu dari Selandia Baru ke Amerika Serikat yang akan diterapkan dalam TPP. Apabila benar-benar diterapkan, maka hal ini hanya akan memberikan peluang besar bagi produk olahan susu dari Selandia Baru namun memberikan manfaat yang kecil bagi produsen susu Amerika Serikat untuk memasuki pasar Selandia Baru dikarenakan adanya *tariff-rate*

¹²⁷“*New Democrats Urge Obama to Continue TPP Talks*”, *Inside US Trade*; 13 Maret 2009.

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹Surat dari *House Trade Working Group* kepada USTR Ron Kirk, *Loc. Cit.*



quotas yang dapat menyebabkan kerugian bagi produsen susu Amerika Serikat sebesar 20 miliar dolar dalam kurun waktu 10 tahun.¹³⁰

4.3 Kontroversi dalam Proses Negosiasi *Trans-Pacific Partnership*

4.3.1 *Secrecy in Negotiations*

Proses negosiasi melibatkan aktor-aktor yang tergabung dalam keanggotaan dari negosiasi tersebut. Demi terciptanya negosiasi yang komprehensif dan menguntungkan bagi semua pihak, perlu adanya partisipasi dari pihak ketiga baik dari dalam keanggotaan negosiasi maupun dari luar keanggotaan negosiasi tersebut sebagai pengamat atau pengawas.¹³¹ Adanya pihak ketiga ini menjamin transparansi dalam proses negosiasi sehingga masyarakat dapat mengetahui jalannya proses negosiasi yang sedang berlangsung.

Menurut peraturan *European Council* no 1049/2001 tentang *public access to European Parliament, Council and Commission documents* (akses publik terhadap dokumen-dokumen Parlemen, Dewan dan Komisi Uni Eropa) bahwa keterbukaan atau transparansi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat dengan cara yang demokratis.

¹³⁰ Surat kepada USTR Ron Kirk, 11 Maret 2010, dalam http://feingold.senate.gov/pdf/ltr_031110_tpp.pdf

¹³¹ Jeffrey Kucik dan Krzysztof Pelc, *Secret Negotiations at the World Trade Organization Create a Big Problem*, dalam https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/06/secrecy-in-international-trade-negotiations-is-a-good-thing-true-or-false/?utm_term=.8712296914b0, diakses pada 4 Juli 2018.



serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.¹³²

Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan yang dimaksud adalah semua jenis proses pembuatan kebijakan termasuk negosiasi pembentukan sebuah perjanjian (*agreement*), baik dalam tingkat legislatif maupun eksekutif.¹³³

Proses negosiasi TPP mengikuti proses negosiasi yang digunakan dalam *World Trade Organization* (WTO), yaitu *private consultations*, dimana negara dapat melakukan negosiasi tertutup dengan negara lain sebelum menetapkan kesepakatan yang sah.

Namun metode ini memiliki kelemahan. Negosiasi yang dilakukan secara tertutup memberikan peluang besar bagi suatu negara untuk membuat kesepakatan yang dapat merugikan negara/pihak lain.¹³⁴

Tidak hanya itu, negosiasi tertutup, terutama dalam negosiasi perdagangan, dapat berujung kepada pembentukan kesepakatan dagang yang bersifat diskriminatif, satu pihak secara tidak adil dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pihak lainnya.¹³⁵

Berdasarkan salinan dokumen negosiasi TPP yang bocor melalui situs *wikileaks*, negosiasi yang dilaksanakan secara rahasia tersebut dihadiri oleh sekitar 500 penasehat perusahaan besar

¹³²European Communities, Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents, Preamble (1), pdf.

¹³³Paivi Leino, "Secrecy, Efficiency, Transparency in EU Negotiations: Conflicting Paradigms?", dalam jurnal *Politics and Governance*, vol. 5, 2017, hal. 7.

¹³⁴Jeffrey Kucik dan Krzysztof Pele, *Measuring the Cost of Privacy: A Look at the Distributional Effects of Private Bargaining*, dalam jurnal *British of Political Science*, vol. 46, 2015, hal. 861.

¹³⁵*Ibid.*



Amerika Serikat.¹³⁶ Para perwakilan dari perusahaan tersebut mendorong negara-negara lain untuk menyesuaikan dengan beberapa poin yang mereka ajukan. Salah satu area yang menjadi pertentangan paling besar antara Amerika Serikat dengan negara lain adalah mengenai isu perlindungan hak kekayaan intelektual.¹³⁷

Dalam aspek perlindungan hak paten, Amerika Serikat mengajukan untuk memberlakukan perlindungan paten bagi seluruh produksi obat-obatan yang dilakukan oleh perusahaan. Perlindungan ini berlaku untuk obat-obatan yang beredar di pasaran, yang sedang dalam proses produksi maupun dalam tahap riset, serta obat-obatan yang diproduksi secara generik.¹³⁸ Dengan kata lain, semua jenis

obat yang beredar atau yang akan beredar di pasaran harus merupakan obat yang diproduksi oleh perusahaan obat-obatan/medis.

Hal ini secara tidak langsung memberikan hak bagi perusahaan untuk melakukan monopoli terhadap pasar obat-obatan dan mencegah obat-obatan generik untuk masuk kedalam pasar.¹³⁹

Perlindungan paten ini juga berlaku dalam hal prosedur penanganan medis, serta produksi dan penggunaan alat-alat bedah.

Amerika Serikat mengajukan perlindungan paten terhadap segala jenis peralatan bedah, termasuk untuk penggunaan terhadap hewan,

¹³⁶Laporan analisis oleh berbagai lembaga perserikatan dan lembaga *think tank*, *Secret TPP Text Unveiled: It's Worse than We Thought*, 2015, hal. 1.

¹³⁷*TheRealNews*, "Wikileaks TPP Revelations Prove US in 'Left Field' with Trade Deal", dalam https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=I62YLGrl5IA, diakses pada 6 Juli 2018.

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹Laporan analisis oleh berbagai lembaga perserikatan dan lembaga *think tank*, *Secret TPP Text Unveiled: It's Worse than We Thought*, 2015, hal. 1.



manusia, dan segala kegiatan bedah medis lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin keuntungan semua perusahaan produksi peralatan medis dan semua prosedur bedah medis harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.¹⁴⁰

Kontroversi juga muncul dalam pembahasan mengenai aspek perlindungan hak cipta. Amerika Serikat mengajukan perlindungan hak cipta dari 70 tahun setelah kematian pengarangnya menjadi 100 tahun setelah kematian pengarangnya untuk hasil karya yang diterbitkan secara individu, dan menjadi 95 tahun setelah kematian pengarangnya untuk hasil karya yang diterbitkan oleh koperasi atau perusahaan.¹⁴¹

Selain itu, Amerika Serikat juga mengusulkan pembaharuan dalam pendefinisian pelanggaran hak cipta, dimana bahwa kegiatan mereproduksi sebuah karya cipta secara sementara untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dari pemilik hak cipta seperti membaca atau mengunduh sesuatu dari internet akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan akan dikenakan hukuman berat.¹⁴² Hal ini dinilai oleh negara-negara lain dapat merugikan individu masyarakat dan hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan penerbit karya cipta tersebut.

¹⁴⁰TheRealNews, "Wikileaks TPP Revelations Prove US in 'Left Field' with Trade Deal", dalam https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=I62YLGrl5IA, diakses pada 6 Juli 2018.

¹⁴¹Miriam Bitton, "Examining the Trans-Pacific Partnership Agreement", dalam *Journal of Internet Law*, Maret 2014, hal. 32.

¹⁴²*Ibid.*



Dari salinan dokumen negosiasi TPP yang bocor tersebut terlihat bahwa negosiasi ini sangat berpihak terhadap perusahaan, bahkan Kongres tidak diberikan partisipasi yang cukup besar dalam negosiasi.¹⁴³ Poin-poin yang dimuat dalam dokumen negosiasi tersebut dibuat oleh perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang telah dipilih oleh *United State Trade Representative* (USTR) dan semata-mata untuk menjamin keuntungan dari perusahaan tersebut. Sehingga dalam kata lain, negosiasi TPP adalah negosiasi yang sangat mendukung kepentingan perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat untuk mencari kemudahan dalam melakukan ekspansi usahanya ke negara lain.¹⁴⁴

¹⁴³Laporan analisis dari berbagai lembaga perserikatan dan lembaga *think tank*, *Secret TPP Text Unveiled: It's Worse than We Thought*, 2015, hal. 2.

¹⁴⁴Natalie Sears, *Op.cit.*, hal. 110.